

BAB II

KEBIJAKAN INGGRIS DALAM KEANGGOTAN DI UNI EROPA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai sejarah panjang Inggris dan Uni Eropa hingga bergabungnya Inggris ke dalam keanggotaan Uni Eropa pada tahun 1973 serta manfaat yang didapat selama Inggris menjadi salah satu anggota Uni Eropa. Inggris resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973, pada saat itu Inggris melihat keberhasilan yang dicapai oleh Uni Eropa dalam memajukan perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa, yang mana pada saat itu anggota Uni Eropa berjumlah enam negara dan keenam negara tersebut adalah pemrakarsa terciptanya ECSC (*European Coal and Steel Community*) pada tanggal 18 April 1951 dan telah berganti nama menjadi Uni Eropa hingga sekarang ini. Enam negara tersebut antara lain Luxemburg, Jerman, Belanda, Italia, Prancis dan Belgia.

Inggris memiliki sejarah yang sangat panjang dengan Uni Eropa bahkan sejak Inggris belum bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Inggris memiliki kontribusi yang besar terhadap Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi kawasan Internasional Eropa memandang bahwa Inggris merupakan negara yang substansial bagi organisasi tersebut. Hingga referendum terakhir digelar tanggal 23 Juni 2016 lalu, Inggris dan Uni Eropa selalu menarik untuk diteliti.

A. Deskripsi Umum Inggris

Britania Raya dan Irlandia Utara (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* atau *United Kingdom* atau secara umum dikenal sebagai Britania Raya atau Inggris Raya merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. Inggris Raya adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari Pulau Britania Raya, bagian timur laut Pulau Irlandia dan sejumlah pulau-pulau yang lebih kecil. Irlandia Utara adalah satu-satunya bagian dari Britania Raya yang berbagi perbatasan darat dengan negara berdaulat lain, yaitu Republik Irlandia. Selebihnya, perbatasan darat Britania Raya dikelilingi oleh Samudera Atlantik, Laut Utara, Selat Inggris dan Laut Irlandia. (Johnson)

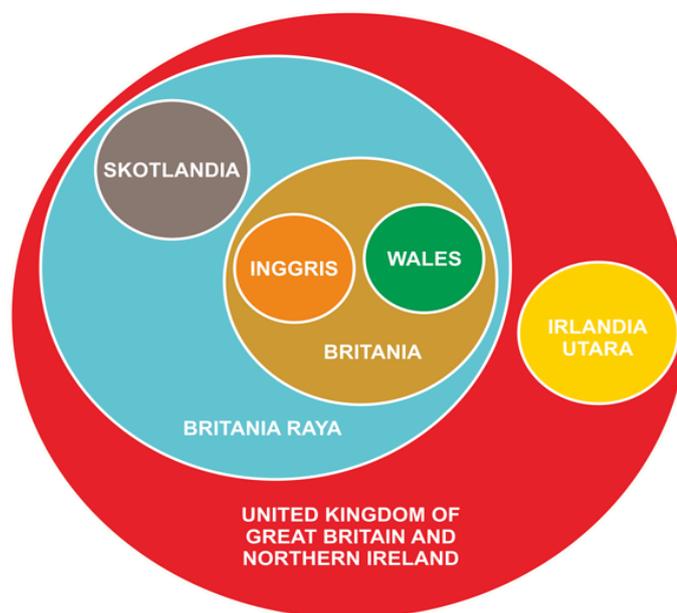
Britania Raya atau Inggris Raya adalah sebuah negara kesatuan yang diatur di bawah monarki konstitusional dan sistem parlementer dengan ibu kota pemerintahannya berada di London. Terdapat empat negara dalam kedaulatan Inggris Raya yang masing-masingnya berdiri sendiri : Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Inggris Raya adalah salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar keenam di dunia menurut PDB nominal dan terbesar kedelapan di dunia menurut keseimbangan kemampuan berbelanja. Inggris Raya juga merupakan negara industri pertama di dunia dan menjadi penguasa dunia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hingga saat ini, negara ini tetap menjadi kekuatan besar yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, budaya, militer, sains, dan politik. (2014)

Gambar 2.1 Peta *The United Kingdom*



Gambar 2.2 Irisan negara-negara konstituen dalam satu negara berdaulat United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Wilayah geografis Inggris raya tidak sama dengan negara-negara lain di Eropa. Wilayah Inggris raya merupakan wilayah negara kepulauan yang terpisah dengan benua Eropa. Setiap negara memiliki gagasan tertentu dalam peranannya di dunia internasional, sehingga membentuk sebuah identitas negara tersebut. Menilik sejarah di masa lalu Inggris, Inggris memiliki pengaruh yang besar terhadap elit-elit politik di Eropa. Pada abad ke-16 terbentuklah Inggris menjadi kerajaan besar yakni Britania Raya, Inggris kemudian memperluas wilayah kerajaannya hingga Inggris dikenal sebagai negara Imperium terbesar pada saat itu. Akan tetapi, pada abad kekaisaran, Inggris kemudian kembali ke Hongkong China, dikarenakan pada saat itu masa kejayaan imperium Inggris telah berakhir dan negara bekas koloni Inggris tumbuh mandiri. Hingga pada abad ke-20 Inggris membentuk negara persemakmuran. Hingga pada akhirnya, Inggris melihat kesuksesan integrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa pada tahun 1970-an, Inggris memutuskan untuk bergabung dalam organisasi kawasan tersebut. Hal ini dinilai negara-negara Eropa lainnya dan menilai tindakan tersebut sebagai langkah positif Inggris dalam meningkatkan komunikasi dengan negara lainnya dan dalam tujuan mengembalikan keadaan perekonomian atau meningkatkan keadaan ekonomi yang sempat menurun pada saat terjadi krisis. (Perisic, 2010)

B. Sejarah Bergabungnya Inggris Ke Uni Eropa

Bermula setelah perang dunia kedua, muncul keinginan masyarakat Eropa untuk mengembalikan perekonomian dan menyatukan negara-negara di Eropa pasca perang di kawasan tersebut, sehingga pada tahun 18 April 1951 terbentuklah

“*European Coal and Steel Community (ECSC)* yang didirikan oleh enam negara pemakrasa, enam negara tersebut diantaranya Belgia, Prancis, Italia, Luxemburg, Belanda dan Jerman melalui penandatanganan perjanjian *Treaty of Paris* pada April 1951. Hingga pada tanggal 25 Maret 1957 nama tersebut diubah dengan *European Economic Community (EEC)* dengan harapan terciptanya pasar bersama *Common Market*. *Common market* (pasar bersama) adalah tahap integrasi suatu wilayah atau negara-negara dimana pergerakan barang dagang, jasa, modal dan penduduk dibebaskan secara bertahap sampai tidak ada lagi hambatan, dan sekarang dikenal dengan nama Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Perjanjian Maastricht pada 1992 merupakan tonggak awal didirikannya nama Uni Eropa ini.

Keputusan Nasional Inggris untuk tidak menandatangani perjanjian “*The Maastricht*” yang mengharuskan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk menggunakan mata uang Euro. Pada tahun 1991, ini Inggris mengajukan klausul-klausul yang mengemukakan bahwa, Inggris akan terus menggunakan mata uangnya sendiri yakni Poundsterling, hal ini dilakukan Inggris karena Inggris memiliki motif politik lain yakni, Inggris menginginkan dirinya untuk menjadi penyeimbang negara-negara di Eropa, hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa mata uang Inggris pada dasarnya telah stabil di dunia internasional. Selain itu, Inggris juga tidak mau menandatangani perjanjian Schengen. Perjanjian Schengen merupakan perjanjian yang dibuat oleh sejumlah negara Eropa untuk menghapuskan pengawasan perbatasan di antara mereka. Di

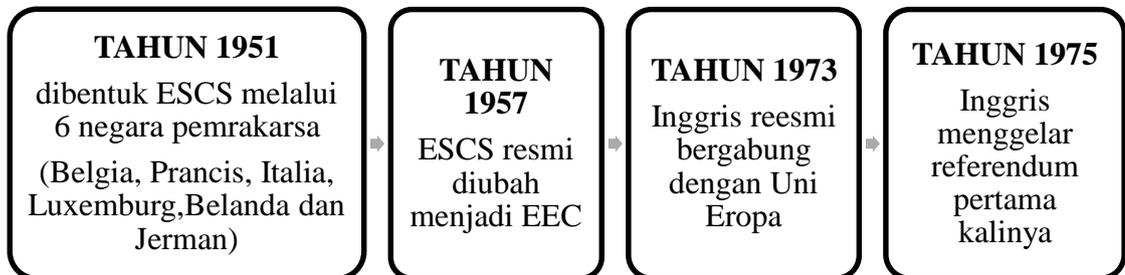
dalam perjanjian ini tercakup berbagai aturan kebijakan bersama untuk izin masuk jangka pendek (termasuk di dalamnya Visa Schengen) atau zona bebas perbatasan. Inggris juga tidak termasuk dalam anggota EFTA, perjanjian perdagangan bebas Eropa. Inggris hanya terikat dalam EEA (European Economic Area) atau kerja sama pertukaran orang, pelayanan, barang, dan modal dalam pasar internal Uni Eropa.

Pada saat itu Inggris sedang dilanda krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 yang kemudian membawa laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di Inggris, Inggris kemudian melirik kesuksesan peningkatan ekonomi yang terjadi di enam negara pemrakarsa Uni Eropa. Keadaan tersebutlah yang kemudian melatabelakangi Inggris bergabung dengan *European Community*. Sejak awal keanggotaan Inggris terhadap Uni Eropa, Inggris mengalami dua kendala berat dalam proses keanggotaannya, yang pertama adalah akses yang terlambat pada tahun 1973 dan untuk tidak menjadi anggota pendiri di tahun 1950 serta hak veto yang dilakukan oleh Jenderal de-Gaulle pada tahun 1960. Jenderal de-Gaulle merupakan salah satu pemimpin militer dan negarawan di Prancis. Periode pemerintahannya terhitung sejak 21 Desember 1945 sampai 8 Januari 1959. Jenderal de-Gaulle menolak akses Inggris untuk bergabung dengan ECSC (*European Coal and Steel Community*) dengan alasan bergabungnya Inggris akan mengganggu pengaruh negara Prancis di Eropa, selain hal tersebut adalah kedekatan Inggris dengan Amerika Serikat yang dianggap akan mengganggu kemandirian Eropa.

Pada tahun 1951 setelah ditandatanganinya *Treaty of Paris*, Perdana Menteri Belgia Paul Henri Spaak melihat potensi *European Coal and Steel Community* di masa yang akan datang, kemudian Paul Henri Spaak mengusulkan diciptakannya *Common Market*, sebagai bentuk integrasi yang lebih besar daripada *European Coal and Steel Community*. Usulan Spaak menjadi dasar dari perjanjian Roma terkait pembentukan masyarakat ekonomi di Eropa dan ditandatangani pada bulan Maret 1957. (Jones, 2007).

Di awal pembentukan Uni Eropa, Inggris melihat adanya perbedaan cukup jauh antara PNB perkapita negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dengan pertumbuhan PNB Inggris, yang kemudian melatarbelakangi Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Hingga pada akhirnya di tahun 1973, Inggris resmi menjadi anggota dalam Uni Eropa meskipun ada beberapa permasalahan tertentu yang terjadi di dalam domestik Inggris sendiri. Permasalahan itu datang dari adanya pendapat dari masing-masing partai yang tumbuh di Inggris terutama partai oposisi yang selalu bernegosiasi terkait keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Terkait dengan pro dan kontra yang terjadi, pemimpin Partai Buruh Harold Wilson berjanji pada pemilu tahun 1974 bahwa akan mengadakan referendum terkait dengan keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Pada tahun 1975, referendum tersebut resmi digelar dengan menunjukkan hasil 67, 23% suara tetap dalam keanggotaan Uni Eropa. (United Kingdom European Communities membership referendum, 1975).

Tabel 2.3 Timeline proses integrasi Inggris terhadap Uni Eropa:



Uni Eropa memiliki 28 negara anggota, Prancis merupakan negara inisiator terbentuknya ESCS pada saat itu. Berikut negara-negara yang bergabung dengan Uni Eropa beserta tanggal bergabungnya ke Uni Eropa:

NO.	NAMA NEGARA	TANGGAL BERGABUNG
1	Prancis	Sejak permulaan ESCS dibentuk (Negara Pemrakarsa)
2	Belanda	
3	Belgia	
4	Luxemburg	
5	Jerman	
6	Italia	
7	Britania Raya	1 Januari 1973
8	Denmark	
9	Irlandia	
10	Yunani	1 Januari 1981
11	Portugal	1 Januari 1986
12	Spanyol	
13	Austria	1 Januari 1995
14	Finlandia	
15	Swedia	
16	Republik Ceko	1 Mei 2004
17	Estonia	
18	Hungaria	
19	Latvia	
20	Lituania	
21	Malta	
22	Polandia	
23	Siprus	
24	Slovenia	
25	Slovakia	

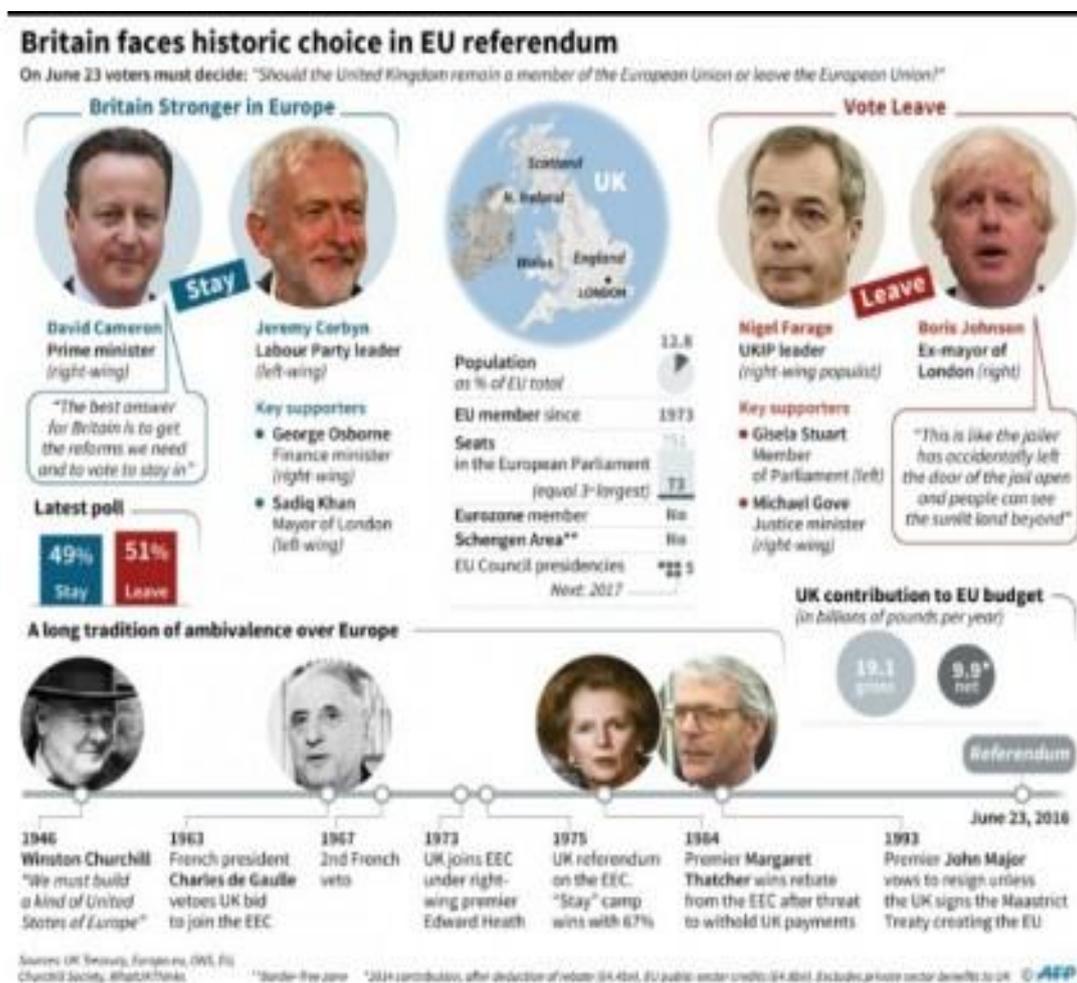
26	Bulgaria	1 Januari 2007
27	Rumania	
28	Kroasia	1 Juli 2013

Referendum melibatkan beberapa negara di Britania Raya untuk memberikan suara dalam referendum tersebut, negara-negara tersebut antara lain Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Skotlandia dan Irlandia Utara. Faktanya, pada referendum Inggris, tidak semua negara setuju untuk keluar dari Uni Eropa. Skotlandia dan Irlandia Utara memilih untuk tetap bertahan pada keanggotaan Uni Eropa. Hal ini berkaitan dengan sejarah masa lalu Skotlandia dan Irlandia. (Arungebudoyo, 2016)

Di Skotlandia dan Irlandia, di mana sebagian besar warga memilih untuk tetap di dalam Uni Eropa, muncul peningkatan tekanan bagi dilakukannya kembali referendum kemerdekaan dari Inggris Raya. Hal ini juga mengakibatkan resiko perpecahan di Negara berdaulat Britania Raya. Alasan Skotlandia dan Irlandia Utara tidak terlepas dari sejarah masa lalunya. Skotlandia dan Irlandia Utara ingin merdeka dan memisahkan diri dari Inggris Raya, ditambah lagi seiring dengan isu Inggris keluar dari Uni Eropa, maka semakin mendukung keputusan mereka. Skotlandia dan Irlandia Utara melihat masa depan dengan Uni Eropa akan lebih baik. Irlandia memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Uni Eropa tetapi juga yang paling banyak dirugikan dengan keluarnya Inggris. Implikasinya diperkirakan akan luas bagi perdagangan, ekonomi, ketahanan pasok energi dan perdamaian di wilayah Irlandia Utara yang dikuasai oleh Inggris. Sementara itu, partai nasionalis terbesar Irlandia, Sinn Fein mengatakan karena Irlandia Utara memberikan suara untuk tetap di dalam Uni Eropa, maka mereka memiliki alasan

yang lebih kuat bagi dilakukannya referendum untuk bergabung dengan Republik Irlandia (Siadari, 2016). Sementara itu, Skotlandia melihat bahwa anggota Uni Eropa membawa pengaruh yang moderat bagi kehidupan politik di Inggris Raya (Malau, 2016)

Gambar 2.4 Britain faces historic Choice in UE Referendum



Keanggotaan Inggris terhadap Uni Eropa menimbulkan beberapa opini dari semua elemen masyarakat yang tinggal di Inggris. Opini tersebut muncul dari rakyat Inggris itu sendiri, pelaku bisnis, partai politik dan lain sebagainya. Dengan

datangnya opini yang datang dari berbagai pihak tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan yang dapat mempengaruhi kondisi politik di Inggris. Terdapat beberapa tokoh seperti David Cameron dan Jeremy Corbyn keduanya berasal dari partai yang berbeda mengaku mendukung Inggris untuk tetap di Uni Eropa. David Cameron merupakan perdana menteri yang menjabat pada saat itu (13 Mei 2010 sampai 13 Juli 2016) memberikan inisiasi atas digelarnya referendum Inggris di tahun 2016 dan menjanjikan untuk lengser dari jabatan beliau sebagai Perdana Menteri apabila keputusan referendum menghasilkan putusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Sementara itu, dari kubu pro-*Brexit* terdapat Boris Johnson (mantan walikota London) dan Nigel Farage dari pemimpin partai UKIP yang mendukung Inggris tetap keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Sementara itu muncul beberapa opini dari beberapa kelompok bisnis. Kelompok bisnis Inggris mengaku khawatir dengan langkah Inggris keluar dari Uni Eropa. Inggris dan Uni Eropa telah lama menjalin kerjasama perdagangan bahkan sebelum Inggris bergabung dalam Uni Eropa. Kerjasama perdagangan tersebut terlihat dari kegiatan ekspor maupun impor yang dilakukan antara kedua belah pihak. Pada tahun 1962, persentase ekspor Inggris dengan negara-negara Uni Eropa hanya 35%; pada tahun 1973, kemudian meningkat menjadi 42%. Dampak positif ini bahkan lebih kuat di sisi impor. Persentase tingkat impor Inggris dari dengan negara-negara Uni Eropa meningkat dari 1962 sampai 1973 dari sekitar 30% menjadi hampir 43%. Dampak positif terus meningkat seiring setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Antara tahun 1973 dan 1990,

perdagangan hubungan antara Inggris dan Uni Eropa lainnya memperdalam lebih jauh. Baik Inggris ekspor dan impor harga naik menjadi sekitar 60%. Dengan semakin intens nya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh kelompok bisnis di Uni Eropa, maka kelompok bisnis menolak Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Karena terkait dengan kerugian finansial yang akan mereka dapatkan pasca Inggris keluar dari Uni Eropa dan tidak adanya akses mudah kegiatan perdagangan ke negara-negara Eropa lainnya.

Berbeda dengan hal tersebut, media juga turut memberikan suara atas keanggotaan Inggris pada Uni Eropa. Sebagian besar pers (media) Inggris hampir bulat mendukung Inggris yang tersisa di dalam EEC pada saat tahun digelarnya referendum 1975. Namun, setelah partai Buruh dan Konservatif datang memberikan jejak pendapat yang berbeda dengan hal itu terkait masa depan Inggris untuk Eropa, maka opini pers mulai bergerak ke arah yang berlawanan (Daddo, 2016)

C. Kebijakan Inggris Bergabung Dengan Uni Eropa

Hubungan Uni Eropa dengan Inggris sudah lama terjalin sejak *European Economic Community*. Hubungan yang cukup lama ini telah memberikan banyak dampak dan pengaruh terhadap Inggris sendiri. Ketika Inggris bersedia untuk bergabung dengan Uni Eropa maka Inggris harus bersedia menerima konsekuensi dari bergabungnya Inggris terhadap Uni Eropa. Uni Eropa sangat mengikat negara-negara anggota Uni Eropa, Prinsip *Subsidiarity* (adalah membatasi

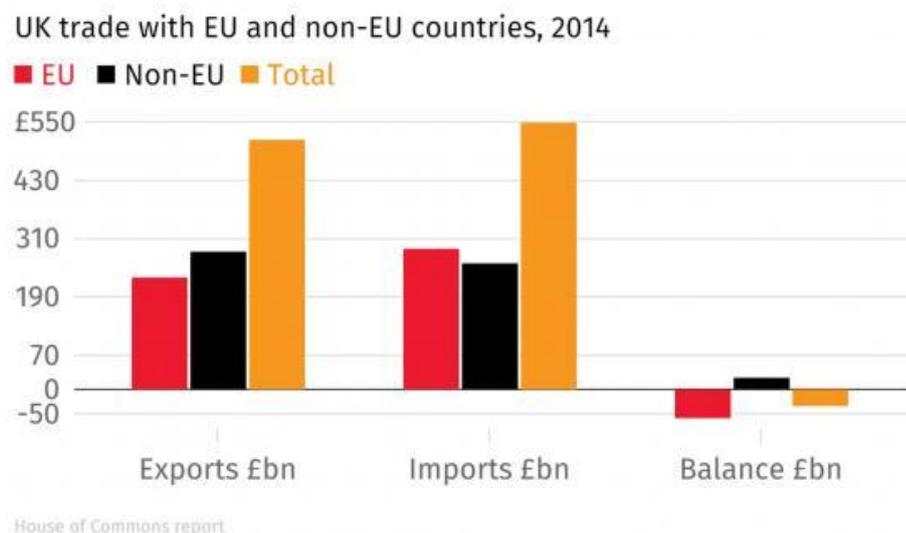
wewenang institusi) yang ditanamkan Uni Eropa mengikat hukum dalam pertukaran untuk representasi dalam lembaga legislatif dan yudikatif umum. Negara-negara anggota harus setuju dengan suara bulat bagi Uni Eropa untuk mengadopsi kebijakan yang menyangkut pertahanan dan urusan luar negeri.

Sebagai negara yang mempunyai sektor industri yang kuat di kawasan Uni Eropa, Inggris mampu mempengaruhi pembentukan kebijakan dalam Uni Eropa. Inggris melakukan beberapa kebijakan yang menjadi pedoman arah kerjasama. Salah satunya adalah *an ethical dimension* yang menyatakan akan lebih memberikan perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan juga hubungan dalam transfer persenjataan. Inggris juga memiliki *mission statement* yang menjelaskan bahwa Inggris akan bekerja untuk mengejar kepentingannya di bidang keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Kepentingan itu akan dicapai dengan menggunakan dua prinsip utama, yaitu *joined up dan open government* (Lun, 2008). Inggris juga memprioritaskan beberapa hal berikut:

1. Keamanan dunia dari terorisme dan serangan senjata yang bersifat *mass destruction*
2. Mengurangi kejahatan yang ada di Inggris sendiri
3. Menghindari konflik yang ada pada tatanan sistem internasional
4. Menciptakan European Union sebagai tempat yang efektif untuk bersaing
5. Meningkatkan perekonomian Inggris dengan *expanding global economy, science* dan suplai energi

Memiliki potensi dampak yang sangat tinggi adalah pada sektor perdagangan dan investasi, memiliki dampak politik yang lebih luas di Uni Eropa, baik dengan mengganggu dinamika politik internal dan meninggalkan Uni Eropa dapat mendorong pasukan disintegratif di negara-negara anggota lainnya. Semua negara anggota bagaimanapun akan merasakan dampak tersebut, baik secara politik maupun ekonomi. (Counsel, The Impact On the UK and the EU, 2015) Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Inggris, sehingga Inggris sangat bergantung pada Uni Eropa.

Gambar 2. 5 Grafik Perdagangan Inggris Dengan Uni Eropa



Menurut 71% dari semua anggota Konfederasi Pengaruh Inggris (CBI), dan 67% dari usaha kecil dan menengah (UKM), Uni Eropa telah berdampak positif secara keseluruhan pada bisnis mereka. CBI memperkirakan bahwa keuntungan bersih dari keanggotaan Uni Eropa senilai 4-5% dari GDP untuk

Inggris atau £62bn- £78bn per tahun. Pada tahun 2014, Uni Eropayang merupakan ekonomi terbesar di dunia, menyumbang 44,6% dari seluruh ekspor Inggris terhadap barang dan jasa dan 53,2% dari impor Inggris dari barang dan jasa. (Lewis, 2016)

Negara-negara di Eropa dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa melalui proses yang panjang. Setiap negara anggota Uni Eropa memiliki Hak veto atas negosiasi dan persyaratan bergabungnya suatu negara ke dalam organisasi kawasan ini. Berikut tiga titik keputusan besar dalam tahapan akses Uni Eropa:

1. Dewan Eropa harus menyetujui kondisi kelayakan oleh kebulatan suara. Berikutnya negosiasi antara Komisi dan mengaksesi negara.
2. Dewan mengambil keputusan akhir untuk memungkinkan negara untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan suara bulat (Dewan harus terlebih dahulu berkonsultasi komisi dan dengan mayoritas sederhana dari Parlemen Eropa). Dewan dan negara-negara anggota memiliki peran dalam pemungutan suara oleh kebulatan suara untuk membuka dan menutup untuk sementara setiap “bab” negosiasi sebelum keputusan akhir
3. Hingga akhirnya, setiap negara anggota harus menyetujui perjanjian mengakui negara untuk bergabung dengan Uni Eropa, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. (Government H. , 2016, hal. 16)

Proses aksesinya ini sangat sulit dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti yang dialami oleh Kroasia dan Turki. Negara Eropa dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa jika menghormati dan berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai Uni Eropa, yaitu kebebasan, kesetaraan, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat dan supremasi hukum. (Government H. , 2016, hal. 17)

D. Keuntungan Inggris selama Keanggotaan Uni Eropa

Inggris merupakan negara terbesar penyumbang dana Uni Eropa terbesar ketiga di Uni Eropa. Sehingga, patut dipertanyakan apa saja yang didapatkan Inggris dari Uni Eropa selama keanggotaan mengingat Inggris tidak sedikit mengeluarkan anggaran negaranya untuk Uni Eropa. Suatu hubungan bilateral diharapkan menciptakan *feedback* yang saling menguntungkan antar negaranya, meskipun Uni Eropa bukanlah salah satu negara melainkan salah satu organisasi kawasan yang mampu menjamin kebutuhan para anggotanya. Namun, kontribusi jumlah yang besar yang diberikan Inggris tidak serta merta Inggris menjadi prioritas negara yang diuntungkan dibandingkan dengan negara lain. Kondisi Inggris yang diharapkan membaik setelah bergabung dengan Uni Eropa tidak sesuai harapan negara ini.

Sejak awal bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa Inggris melihat peluang yang besar terkait dengan pendapatan negara yang meningkat setelah bergabung dengan Uni Eropa. Melihat sejarah awal pembentukan Uni Eropa yang dimulai dengan isu re-konstruksi pembangunan ekonomi pasca perang dunia ke-2,

kita akan melihat bahwa kebijakan utama Uni Eropa adalah ekonomi. Namun seiring dengan pembentukan Uni Eropa sebagai satu pemerintahan, maka sekarang ini Uni Eropa telah menjadi kesatuan politis yang tentu saja kebijakannya akan didasari pada kepentingan politik negara-negara anggotanya.

Berikut Kebijakan utama Uni Eropa berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu:

1. Pillar satu adalah Komunitas Eropa
2. Pillar dua adalah Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama
3. Pillar tiga adalah Kerja sama Polisi dan Kehakiman

Ketiga pilar inilah yang menjadi landasan kebijakan utama yang dikeluarkan dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap negara anggota. Kebijakan utama memang terlihat sebagai kebijakan yang dirancang untuk internal Uni Eropa. Namun, internalitas kebijakan-kebijakan Uni Eropa tidak terlepas nantinya dengan kebijakan eksternal Uni Eropa sebagai organisasi kerjasama internasional.

Kembali lagi kepada peluang keuntungan yang didapat Inggris selama keanggotaan tersebut diantaranya muncul dari segala sektor baik politik maupun ekonomi, peluang keuntungan tersebut antara lain:

1. Seiring kemunculan pasar tunggal di Uni Eropa, Inggris paling tidak menjamin penduduknya mendapatkan 3,5 juta pekerjaan di kawasan Uni Eropa
2. Terjaminnya kegiatan ekspor dan investasi dikarenakan Uni Eropa membeli lebih dari 50% dari ekspor Inggris (54% barang, 40% dari jasa).

Lebih dari 300.000 perusahaan Inggris dan 74% dari eksportir Inggris beroperasi di pasar Uni Eropa lainnya.

3. Terjaminnya negosiasi perdagangan yang dilakukan Inggris terhadap negara-negara di dunia. Di luar anggota Uni Eropa diwajibkan melakukan re-negosiasi ulang kesepakatan perdagangan dengan negara lain. Sedangkan Uni Eropa merupakan pasar terbesar di dunia
4. Terjaminnya keamanan masyarakat Inggris untuk tinggal dalam kawasan Uni Eropa, perbaikan kualitas hidup dan kualitas demokrasi di kawasan tersebut. (1611)

Inggris masuk sebagai anggota resmi *European Community* pada tanggal 1 Januari 1973 bersama dengan Irlandia dan Denmark. Meskipun memperoleh dukungan mayoritas dari anggota Partai Konservatif, namun tindakan menyebabkan segregasi (pemisahan) di dalam tubuh partai tersebut. Salah satu anggota Partai Konservatif, Enoch Powell secara terbuka menolak ide keanggotaan Inggris dalam *European Community*. Powell pun menjadi pemimpin bagi sekitar 60 anggota parlemen sayap kanan yang memiliki pandangan serupa. Pada tahun 1971, sebelum pengambilan suara kedua dilakukan, dua anggota kabinet junior dari Partai Konservatif, Teddy Taylor dan Jasper Moore, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan kebijakan keanggotaan.

Perdebatan keanggotaan Inggris melahirkan sejumlah kelompok partisan seperti *Pro Euro Conservative Party*, *Keep the Pound* dari Partai Konservatif, dan *Labour Against the Euro Group*. Kelompok non-partisan yang lahir dari kontroversi *Economic Monetary Union* (EMU) misalnya saja *4sterling*, *Bussiness*

for Sterling, New Europe, dan the New Alliance. Sejumlah kelompok lama seperti *Democracy Movement, European Movement, dan Britain in Europe* juga turut ambil bagian dalam perdebatan *Economic Monetary Union (EMU)*. (Forster, 2002, hal. 107)

Bagan 2.6 Perdebatan pro-Uni Eropa dan pro-brexit

ARGUMEN DARI	PRO-UNI EROPA	PRO-BREXIT
Anggota parlemen, tokoh politik, pelaku bisnis, anggota partai	David cameroon (PM Inggris 2010- Juli 2016), Sadiq khan (<i>London mayor</i>), Nicola sturgeon (<i>Scotland first minister</i>), Richard Branson (<i>entreprenuer</i>), Stephan Hawking (Physicist), Benedict Cumberbath (<i>Actor</i>) , Jeremy Cortyn (partai buruh)	Boris Johnson (<i>Former London Mayor</i>), Nigel Farage (<i>UKIP leader</i>), Michael Gove (<i>Justice secretary</i>), Bernie Ecleston (Formula One CEO), Joan collin (<i>Author and actress</i>), John cleese, Enoch Powell (partai konservatif) , Teddy Taylor (partai konservatif), Jasper More (Partai konservatif)
Kelompok partisan	<i>Pro-Euro Conservative Party, Keep the Pound</i> (partai konservatif), <i>Labour Againts the Euro Group</i>	<i>4sterling, bussines for sterling, New Europe, New Aliance, Democracy Movement, European movement, Britain in Europe</i>
Rakyat Inggris Raya (kelompok tua, kelompok muda)	18-34 tahun sekitar 64% menyatakan tetap pada Uni Eropa,	35-54 tahun memutuskan memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa
Penduduk kota besar dan kota kecil	Kota-kota besar seperti London, Bristol dan Brimingham sebagian besar warganya memilih untuk tetap pada Uni Eropa	Kota-kota kecil mendukung Inggris untuk keluar dari Uni Eropa

Sebuah analisis wacana juga dapat menguatkan indikator opini publik rakyat terkait dengan keanggotaan Uni Eropa. Berdasarkan laporan CNN di tahun

2016, beberapa tokoh menyuarakan pendapatnya terkait dengan keanggotaan Inggris pada Uni Eropa. Suara atau argumen-argumen tersebut sekaligus mewakili dan menguatkan bahwa adanya opini publik yang terbentuk dalam rakyat Inggris. Berikut klasifikasi argumen-argumen dari para pendukung pro Uni Eropa:

1. Argumen pertama datang dari David Cameron yang mengatakan bahwa *“voting leave would leave Britain a permanently poorer country in every sense and reduce its global influence.”* Cameron warns argumen Cameron dimaksudkan bahwa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa maka Inggris akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara maju dalam bidang perekonomian, serta Inggris akan kehilangan pengaruh terhadap dunia Internasional. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan kehidupan negara tersebut, sehingga David Cameron pada tahun 2015 berani untuk mengampanyekan suaranya untuk tetap pada keanggotaan Uni Eropa, bahkan Cameron juga berjanji bersedia mundur dari jabatannya sebagai perdana Menteri apabila referendum menghasilkan keputusan untuk meninggalkan Inggris pada pemilu tahun 2015.
2. Selanjutnya, Perdana menteri pertama Skotlandia Nicola Sturgeon berargumen *“voting to leave the European union would be a catastrophically damaging decision”* Skotlandia merupakan salah satu negara berdaulat yang mendukung Inggris untuk tetap pada keanggotaan Uni Eropa, dari Perdana menteri pun menyetujui dan berargumen seperti tersebut, maksud dari argumen Nicola Sturgeon bahwasannya terlalu beresiko bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.

3. Selain para tokoh politik, salah satu *entrepreneur* Inggris Richard Branson mengatakan “*Leaving the European Union not one of the risks i would want the UK to take-not as an investor, not as father and not as a grandfather*” sebagai salah satu pelaku bisnis dalam negara Inggris, Richard Branson sama sekali tidak menginginkan akan Inggris keluar dari Uni Eropa, hal ini tentu terkait dengan keberlangsungan investasi yang kemudian dapat merugikan para pelaku bisnis di Inggris itu sendiri, mengingat banyak sekali negara ataupun *private sector* yang sangat tertarik untuk berinvestasi ke negara besar seperti Inggris.

Sementara para pendukung pro-brexit turut menyuarakan argumennya, diantaranya:

1. Nigel Farage seorang pemimpin dari *UK Independence party* mengatakan “*member of parliament should make Britain’s laws not unelected old men in Brussels-who we can not vote for or remote*” dari argumen beliau menyatakan bahwa anggota parlemen harus membentuk sebuah Undang-undang yang mengikat negaranya, sehingga kedaulatan Inggris tetap berada pada negaranya, bukan tunduk terhadap organisasi supranasional seperti Uni Eropa, karena peraturan-peraturan yang mengikat yang dibentuk oleh dewan Eropa.
2. “*We can take back the billions we give to the European Union-get rid of the regulations-forgo trade deals and partnerships with nations across the globe, if Britain leaves the European Union-the conservative minister argues*” Michael Gove (*Justice Secretary*) argues berkaitan dengan

argumen Michael Gove, yang dalam argumennya menyimpulkan bahwa setelah Inggris lepas dari hegemoni Uni Eropa, Inggris dapat mendapatkan peluang keuntungan dalam hubungan perdagangan dan penawaran dalam dunia Internasional. Inggris secara bebas diperbolehkan untuk bekerjasama dagang oleh negara manapun tanpa terikat perjanjian dagang Uni Eropa. Kemudian, diharapkan peluang keuntungan yang tercipta akan semakin besar dibandingkan Inggris masih tetap bergabung pada Uni Eropa.

3. *“I know what we gives the European union but not what it gives us back”*

Bernie Ecclestone (Formula One CEO) says, pelaku bisnis seperti Bernie Ecclestone sekalipun juga tidak mau ketinggalan untuk menyuarakan pendapatnya, beliau juga mengerti seberapa besar kontribusi yang diberikan Inggris terhadap Uni Eropa, akan tetapi menurut beliau Uni Eropa tidak memberikan sesuatu perubahan yang signifikan terhadap negaranya.

Dari beberapa argumen diatas, merupakan sebuah bukti yang dapat mendukung adanya opini publik yang terbentuk dari masyarakat. Meskipun ada beberapa pandangan dari rakyat yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi pandangan melalui sebuah analisis wacana tersebut cukup kuat untuk mendukung dan melatarbelakangi Inggris keluar dari Uni Eropa.